

LECTURER PARTICIPATION AT P.IPS FKIP RIAU UNIVERSITY IN THE 2019 PRESIDENTIAL ELECTION

Anissa Madina Damanik¹, Hambali², Ahmad Eddison³

Email: madinaanisa1882@gmail.com¹, unri.hambali@yahoo.com², ahmadeddison@gmail.com³

Phone Number: 0812 6168 0064

*Pancasila and Civics Education Study Program
Faculty of Teacher Training and Education
Riau University*

Abstract: *This study aims to determine the political participation of lecturers majoring in Social Sciences Education (P.IPS) FKIP Riau University in the 2019 presidential election. Data management is performed using quantitative descriptive analysis. Samples from this study were all lecturers majoring in P-IPS FKIP Riau University as many as 44 lecturers divided into 3 departments namely Economic Education, Parallel Education and Pancasila and Citizenship Education (PPKn) with a population of 44 lecturers. The sample collection technique in this study uses the Nonprobability technique that is saturated sample or often called total sampling. According to Sugiyono (2011) the saturated sample is a sampling technique by collecting all members of the population as respondents or samples. To determine the sample size if the subject is less than 100, it is better to take all of it so that the research is population research, but if the larger subject can be taken 20-25%. So the sample in this study were all FKIP Lecturers majoring in P-IPS totaling 44 people. Complete data information in this study was obtained from Primary data and Secondary data. Data collection activities carried out by observation (observation), interviews, questionnaires and documentation. This research is descriptive in nature which aims to describe the conditions or phenomena that exist in the field, then the data obtained will be analyzed with a quantitative descriptive system with a percentage. Based on the results of research conducted, it can be concluded that overall data regarding conventional participation in the 2019 presidential election are mostly in the appropriate category (0% -50%), with the acquisition of a percentage of 32% which means "Respondents (Lecturers) have used their rights political rights according to applicable laws". And Non-Conventional Political Participation in the 2019 Presidential Election is mostly in the appropriate category (0% -50%), with a percentage gain of 3% which means "Respondents (Lecturers) have used their political rights according to applicable Laws".*

Key Words: *Political Participation, Lecturer, Presidential Election*

PARTISIPASI POLITIK DOSEN JURUSAN P.IPS FKIP UNIVERSITAS RIAU DALAM PEMILIHAN PRESIDEN 2019

Anissa Madina Damanik¹, Hambali², Ahmad Eddison³

Email: madinaanisa1882@gmail.com¹, unri.hambali@yahoo.com², ahmadeddison@gmail.com³
Nomor HP: 0812 6168 0064

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Riau

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi politik dosen jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (P.IPS) FKIP Universitas Riau dalam pemilihan presiden 2019. Pengelolaan data dilakukan menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Sampel dari penelitian ini adalah seluruh dosen jurusan P-IPS FKIP Universitas Riau sebanyak 44 dosen yang terbagi kedalam 3 jurusan yaitu Pendidikan Ekonomi, Pendidikan Sejarah dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) dengan jumlah populasi sebanyak 44 dosen. Teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik Nonprobability yaitu sampel jenuh atau sering disebut total sampling. Menurut Sugiyono (2011) sampel jenuh yaitu teknik penentuan sampel dengan cara mengumpulkan seluruh anggota populasi sebagai responden atau sampel. Untuk menentukan besarnya sampel apabila subjek kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya penelitian populasi, namun jika subjek lebih besar dapat diambil 20-25 %. Jadi sampel dalam penelitian ini adalah seluruh Dosen FKIP jurusan P-IPS yang berjumlah 44 orang. Informasi data yang lengkap dalam penelitian ini diperoleh dari data Primer dan data Sekunder. Kegiatan pengumpulan data dilakukan dengan observasi (pengamatan), wawancara, angket dan dokumentasi. Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena yang ada di lapangan, maka data yang diperoleh akan dianalisis dengan sistem deskriptif kuantitatif dengan persentase. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa secara keseluruhan data mengenai partisipasi konvensional dalam pilpres 2019 sebagian besar berada dalam kategori sesuai (0%-50%), dengan perolehan persentase sebesar 32% yang berarti “Responden (Dosen) telah menggunakan hak-hak politiknya menurut Undang-Undang yang berlaku”. Dan Partisipasi Politik Non-Konvensional dalam Pilpres 2019 sebagian besar berada dalam kategori sesuai (0%-50%), dengan perolehan persentase sebesar 3% yang berarti “Responden (Dosen) telah menggunakan hak-hak politiknya menurut Undang-Undang yang berlaku”.

Kata Kunci: Partisipasi Politik, Dosen, Pilpres

PENDAHULUAN

Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto sejak tahun 1967-1998 telah berhasil membawa kemajuan bagi perkembangan pembangunan perekonomian Indonesia hingga membawa Indonesia menjadi satu bukti keajaiban Asia (*Asian Miracle*). Namun Pada masa Orde Baru kehidupan politik sangat represif yang ditandai adanya tekanan yang kuat dari pemerintahan terhadap pihak oposisi atau orang-orang yang berpikir kritis. Sejak bulan Juli 1997, Indonesia mulai terkena imbas krisis moneter hingga mendorong terjadinya krisis di bidang sosial. Ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah akibat tidak mampu mengatasi krisis ekonomi yang menghimpit bangsa Indonesia, mendorong perilaku masyarakat cenderung negatif. Seperti kerusuhan yang memakan banyak korban. (Ghazaly, 2014)

Kekuasaan hukum yang bebas dari kekuasaan pemerintah belum dapat direalisasikan pada masa Orde Baru. Kedudukan presiden yang merangkap sebagai kepala pemerintahan, mendataris Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), dan kepala negara terwujud dalam kekuasaan yang absolut. Hal itu masih ditambah dengan praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta praktik pelanggaran HAM. Keadaan tersebut menambah ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah pada masa itu. Gerakan reformasi dilakukan karena ditemukan banyak penyimpangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tujuan reformasi bidang politik adalah demokratisasi, kebebasan berserikat, berkumpul dan kebebasan berpolitik yang lebih besar. (Ghazaly, 2014)

Berdasarkan dasar pemikiran dan tujuan diubahnya UUD 1945, dapat dipahami bahwa ditumpukannya kekuasaan negara pada MPR sebagai lembaga tertinggi negara merupakan persoalan pokok dalam kehidupan bernegara. Teori kedaulatan rakyat digunakan untuk menjelaskan secara filosofis dan bersifat makro mengenai rakyat sebagai asasi berdaulat di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai satu-satunya orang yang berhak dalam menentukan arah dan tujuan negara.

Partisipasi politik masyarakat merupakan bentuk perwujudan negara demokrasi. Negara tanpa partisipasi politik masyarakat cenderung otoriter dan sentralistik. Pengalaman politik pada saat orde baru memperlihatkan kesewenangan para pengambil keputusan politik dalam setiap perumusan kebijakan maupun perencanaan program. Akibatnya kebijakan atau yang diputuskan kerap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi dan partisipasi adalah orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan masyarakat maka masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan politik. Partisipasi politik ialah keikutsertaan warga negara biasa dalam proses politik dan ikut serta menentukan segala keputusan yang nantinya akan menyangkut dan mempengaruhi hidupnya.

Sebagaimana kita ketahui, era reformasi sudah berjalan lebih dari satu dasawarsa sejak presiden Soeharto turun dari tumpuk kekuasaannya (Mei 1998). Selama itu pula setidaknya empat kali pelaksanaan pemilu sudah berjalan relatif baik dan benar, sesuai dengan asas-asas pemilu yang sudah ada.

Pelaksanaan pemilihan umum paska reformasi telah dilakukan sebanyak empat kali. Pesta demokrasi lima tahunan Indonesia tidak terlepas dari berbagai macam permasalahan yang selalu menjadi polemik di negeri ini. Permasalahan yang sering

terjadi diantaranya fenomena golongan putih, Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Khusus (DPK), ancaman pemilu, problem kerjasama, radikalisme politik dan kaderisasi partai politik. Tidak terlepas dari permasalahan, menjelang pemilu 2014 banyak kejanggalaan yang terjadi, salah satunya yaitu partai politik merajuk minta dana untuk kampanye naik hal ini beralasan agar partai politik tidak lagi terus-terusan dikuasai kepentingan para penyumbang dana, karena penyumbang dana ini hanya ingin mengejar kekuasaan. (Kompasiana, 2015)

Setelah empat tahun masa kepemimpinan Presiden terpilih periode 2014-2019 berakhir, pesta demokrasi pun kembali digelar pada bulan April 2020. Pemilihan Presiden kali ini pun tidak terlepas dari berbagai permasalahan. Ketua Umum Gerakan Daulat Rakyat (GDR), Sangap Surbakti, mengatakan bahwa kecurangan pada pilpres itu terjadi tiga fase, yakni sebelum pemilu, saat pelaksanaan dan setelah pelaksanaan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga diduga dianggap telah menyempurnakan kecurangan hasil Pilpres 2019.

Terlepas dari berbagai permasalahan yang terjadi selama pilpres dilaksanakan, ada juga warga negara yang masih enggan berpartisipasi pada pemilihan Presiden tahun ini dengan berbagai alasan. Salah satunya adalah anggapan bahwa satu suara tidak akan berpengaruh untuk kemajuan Indonesia, bahkan ada yang pasrah kepada pasangan calon nomor urut 1 atau 2 yang terpilih dan berharap yang terpilih dapat membawa Indonesia lebih maju.

Dari pernyataan dan kenyataan di atas, penulis tertarik untuk mengetahui bagaimana partisipasi politik dosen dengan mengangkat judul penelitian “Partisipasi Politik Dosen Jurusan P-IPS FKIP Universitas Riau Dalam Pemilihan Presiden 2019”

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di kampus FKIP Universitas Riau. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh dosen pada Jurusan Pendidikan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial yang meliputi Pendidikan Ekonomi, Pendidikan Sejarah, dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FKIP Universitas Riau dengan jumlah populasi sebanyak 44 dosen. Teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik Nonprobability yaitu sampel jenuh atau sering disebut total sampling. Menurut Sugiyono (2011) sampel jenuh yaitu teknik penentuan sampel dengan cara mengambil seluruh anggota populasi sebagai responden atau sampel. Untuk menentukan besarnya sampel apabila subjek kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya penelitian populasi, namun jika subjek lebih besar dapat diambil 20-25 %. Jadi sampel dalam penelitian ini adalah seluruh Dosen FKIP jurusan P-IPS yang berjumlah 44 orang. Informasi data yang lengkap dalam penelitian ini diperoleh dari data Primer dan data Sekunder. Kegiatan pengumpulan data dilakukan dengan observasi (pengamatan), wawancara, angket dan dokumentasi. Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau fenomena yang ada di lapangan, maka data yang diperoleh akan dianalisis dengan system deskriptif kuantitatif dengan persentase. Dalam menganalisis data menggunakan deskriptif kuantitatif menggunakan perhitungan sebagai berikut:

$$P = f/n \times 100\% \quad (\text{Anas Sudjono, 2015})$$

Adapun tolak ukur untuk Partisipasi Politik Dosen Jurusan P.IPS FKIP Universitas Riau dalam pemeliharaan Presiden 2019 yang menggunakan skala guttman yang dikemukakan oleh Sugiyono adalah sebagai berikut:

Jika pesentase sebesar 0%-50% = Responden (Dosen) telah menggunakan hak-hak politiknya menurut Undang-Undang yang berlaku.

Jika pesentase sebesar 51%-100% = Responden (Dosen) tidak menggunakan hak-hak politiknya menurut Undang-Undang yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menyesuaikan dengan rumusan masalah yaitu bagaimana partisipasi politik dosen Jurusan P-IPS FKIP Universitas Riau dalam pemilihan presiden 2019. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut maka penulis menjawab melalui dua indikator. Dua indikator yang akan menjawab rumusan masalah tersebut yaitu partisipasi politik konvensional dan partisipasi politik nonkonvensional. Dalam hal ini, responden diminta untuk menjawab pertanyaan yang telah disesuaikan dengan dua indikator tersebut yang terdiri dari beberapa deskriptor pada masing-masing itemnya.

Tabel 1. Rekapitulasi data tentang partisipasi politik konvensional

No	Sub Indikator	Jawaban Responden					
		Ya		Tidak		Missing Data	
		F	%	F	%	F	%
1	Menggunakan hak suara dalam pemilihan umum	27	77	8	23	0	0
2	Pernah menjadi panitia pelaksana dalam pemilihan presiden	5	14	29	83	1	3
3	Mengawasi dalam proses pemungutan suara dalam pemilihan presiden 2019	8	23	27	77	0	0
4	Mengawasi dalam proses penghitungan suara pemilihan presiden 2019	12	34	23	66	0	0
5	Berpartisipasi dalam setiap kegiatan pemilihan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah	25	71	10	29	0	0
6	Menyalurkan hak suara dalam pemilihan presiden 2019	28	80	7	20	0	0
7	Mengikuti diskusi politik	17	49	18	51	0	0
8	Tergabung dalam komunitas atau organisasi diskusi politik	6	17	29	83	0	0

9	Mengikuti acara debat politik (sebagai pemirsa) calon presiden dan wakil presiden 2019	17	49	18	51	0	0
10	Mengikuti kampanye yang diadakan oleh sebuah partai politik	2	6	33	94	0	0
11	Berpartisipasi dalam kampanye yang diadakan oleh partai politik	3	9	32	91	0	0
12	Pernah menjadi kader partai politik	2	6	33	94	0	0
13	Membentuk sebuah komunitas atau organisasi karena adanya kepentingan kelompok	2	6	33	94	0	0
14	Bergabung dalam kelompok kepentingan	4	11	31	89	0	0
15	Melakukan komunikasi individual dengan pejabat administratif (Sekretaris Jenderal Partai)	7	20	28	80	0	0
Jumlah		165	472	359	1025	1	3
Rata-Rata		11	32	24	68	0	0

(Sumber : Data Olahan 2020)

Berdasarkan Tabel 1 di atas bahwa menunjukkan rekapitulasi jawaban responden tentang partisipasi politik konvensional terletak pada rentang 0%-50% yang artinya “Ya”. Responden yang menyatakan “Ya” telah menggunakan hak-hak politiknya menurut Undang-Undang yang berlaku. Hal ini dibuktikan dari sumber fakta yang ada 77 % menggunakan hak suara dalam pemilihan presiden 2019, 14 % menjadi panitia pelaksana dalam pemilihan presiden, 23% mengawasi proses pemungutan suara dalam pemilihan presiden 2019, 34% mengawasi penghitungan suara dalam pemilihan presiden 2019, 71% ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan pemilihan presiden yang diselenggarakan oleh pemerintah, 80% menyalurkan hak suara dalam pemilihan presiden 2019, 49% mengikuti diskusi politik, 17% tergabung dalam komunitas atau organisasi diskusi politik, 49% mengikuti acara debat politik (sebagai pemirsa) calon presiden dan wakil presiden 2019, 6% mengikuti kampanye yang diadakan sebuah partai politik, 9% berpartisipasi dalam kampanye yang diadakan oleh sebuah partai politik, 6% menjadi kader partai politik, 6% membentuk sebuah kelompok atau organisasi karena adanya kepentingan kelompok, 11% bergabung dalam kepentingan kelompok, 20% melakukan komunikasi individual dengan pejabat administratif. Temuan dalam penelitian ini diperkuat dengan hasil wawancara dari responden (dosen) yang mewakili setiap Program Studi yang ada di Jurusan P-IPS FKIP Universitas Riau. Responden yang telah diwawancarai dari 3 Program Studi tersebut mengatakan bahwa dalam partisipasi politik konvensional pada Pilpres 2019, responden (dosen) telah menggunakan hak-hak politiknya menurut Undang-Undang yang berlaku. Salah satu prinsip dasar dalam penyelenggaraan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah

“netralitas” artinya setiap Pegawai Pemerintahan tidak boleh berpihak kepada kepentingan siapapun maupun segala bentuk pengaruh. Hal ini diperkuat oleh UU Nomor 5 Tahun 2014 pasal 9 ayat (2) tentang ASN yang menyatakan bahwa “Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Hasil penelitian dinyatakan bahwa responden (dosen) telah menggunakan hak-hak politiknya menurut Undang-Undang yang berlaku juga diperkuat dari hasil perolehan penghitungan responden yang menjawab “Tidak” sebanyak 68% lebih tinggi yang berada pada rentang 51%-100% daripada perolehan responden yang menjawab “Ya”.

Tabel 2 Partisipasi Politik Non-Konvensional

No	Sub Indikator	Jawaban Responden					
		Ya		Tidak		Missing Data	
		F	%	F	%	F	%
16	Mengajukan petisi (permohonan resmi kepada pemerintah) kepada pemerintah	3	9	32	91	0	0
17	Melakukan protes terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah melalui petisi	0	0	34	97	1	3
18	Melakukan protes dengan melakukan demonstrasi atau kegiatan sejenis seperti mengerahkan orang lain untuk melakukan demonstrasi	1	3	34	97	0	0
19	Menghadapi konfrontasi (memutuskan/menetapkan secara sepihak dalam kemitraan atau kerjasama) pada pilpres yang menjadi ajang perebutan kuasa politik	0	0	35	100	0	0
20	Memilih berhenti bekerja karena tuntutan yang tidak dipenuhi oleh pemerintah	0	0	34	97	1	3
21	Memandang biasa (sah-sah saja) apabila kegiatan pemilu diwarnai dengan tindakan kekerasan terhadap harta benda	2	6	32	91	1	3
22	Memandang biasa (sah-sah saja) apabila kegiatan pemilu diwarnai tindakan kekerasan politik terhadap individu	2	6	32	91	1	3
Jumlah		8	23	233	666	4	11
Rata-Rata		1	3	33	95	1	2

Berdasarkan Tabel 2 di atas bahwa menunjukkan rekapitulasi jawaban responden tentang partisipasi politik non-konvensional terletak pada rentang 0%-50% yang artinya “Ya”. Responden yang menyatakan “Ya” telah menggunakan hak-hak politiknya menurut Undang-Undang yang berlaku. Hal ini dibuktikan dari sumber fakta yang ada 9% pernah mengajukan petisi, 0% pernah melakukan protes terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, 3% pernah melakukan protes dengan melakukan demonstrasi atau kegiatan sejenis seperti mengerahkan orang lain untuk melakukan demonstrasi, 0% pernah menghadapi konfrontasi, 0% pernah memilih berhenti bekerja karena tuntutan yang tidak dipenuhi pemerintah, 6% memandang biasa (sah-sah saja) apabila kegiatan pemilu diwarnai dengan tindakan kekerasan terhadap harta benda, dan 6% memandang biasa (sah-sah saja) apabila kegiatan pemilu diwarnai dengan tindakan kekerasan terhadap individu. Hasil dari penelitian ini dapat dinyatakan bahwa responden (dosen) telah menggunakan hak-hak politiknya menurut Undang-Undang yang berlaku diperkuat dari perolehan penghitungan responden (dosen) yang menjawab “Tidak” sebanyak 95% lebih tinggi yang berada pada rentang 51%-100% dibandingkan perolehan responden yang menjawab “Ya”. Jika digabungkan, total persen yang diperoleh dari Partisipasi politik non-konvensional adalah 98%, sebanyak 2% responden tidak bersedia untuk bersedia untuk memberikan jawaban pada angket.

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Partisipasi Politik Dosen Jurusan P-IPS FKIP Universitas Riau Dalam Pemilihan Presiden 2019, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Partisipasi Politik Konvensional pada Pemilihan Presiden 2019 dengan jawaban “Ya” oleh responden terletak pada rentang 0%-50% dengan perolehan persentase sebanyak 32%, sedangkan jawaban “Tidak” oleh responden berada pada rentang 50%-100% dengan perolehan persentase sebanyak 68%. Hasil ini menunjukkan bahwa partisipasi responden pada indikator ini adalah rendah. Hal ini berarti responden (dosen) telah menggunakan hak-hak politiknya menurut Undang-Undang yang berlaku.
2. Partisipasi Politik Non-Konvensional pada Pemilihan Presiden 2019 dengan jawaban “Ya” oleh responden terletak pada rentang 0%-50% dengan perolehan persentase sebanyak 3%, sedangkan jawaban “Tidak” oleh responden berada pada rentang 50%-100% dengan perolehan persentase sebanyak 95% dan missing data dengan persentase 2%. Hasil ini menunjukkan bahwa partisipasi responden pada indikator ini adalah rendah. Hal ini berarti responden (dosen) telah menggunakan hak-hak politiknya menurut Undang-Undang yang berlaku.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa rekomendasi kepada dosen, masyarakat dan peneliti untuk memperhatikan hal-hal berikut:

1. Kepada dosen yang sering disebut sebagai aparatur sipil negara (ASN) untuk dapat selalu memberikan partisipasi politik dalam pemilihan umum terkhusus pemilihan presiden dengan catatan tidak melanggar aturan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam undang-undang tentang hak dan larangan ASN dalam berpartisipasi politik. Dan juga diharapkan kepada dosen untuk tetap mengawasi dan mengikuti setiap bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden yang menjadi tumpuan masyarakat Indonesia yang mengharapkan kehidupan yang sejahtera.
2. Kepada masyarakat untuk selalu selalu berpartisipasi dalam kegiatan pemilu yang diselenggarakan oleh pemerintah, karena walaupun hanya satu suara, juga akan menentukan nasib indonesia dimasa yang akan datang. Dan untuk kedepan agar lebih teliti dan saling mengingatkan, sebab masyarakat meninjau ketika terjadi kesalahan yang akan merugikan kita semua.
3. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya dalam upaya mencapai kesejahteraan bersama.

UCAPAN TERIMA KASIH

1. Prof. Dr. Mahdum., M.Pd Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
2. Bapak Dr. Gimin, M.Pd Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
3. Bapak Supentri., S.Pd. M.Pd Koordinator Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau.
4. Bapak Dr. Hambali., M. Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi I dan Bapak Dr. Ahmad Eddison., M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi II yang banyak memberikan waktu dan pemikirannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Dosen penguji yang selama ini telah memberikan bimbingan serta saran dan masukan, bapak Dr. Gimin, M.Pd, Bapak Drs. Zahirman., MH dan Bapak Haryono., M.Pd
6. Dosen pembimbing Bapak Drs. Zahirman., MH yang telah memberikan saran baik dalam masa pendidikan berlangsung sampai penyelesaian skripsi ini.
7. Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Riau Bapak Drs. Zahirman, MH, Bapak Drs. Ahmad Eddison, M.Si, Bapak Dr. Hambali, M.Si, Ibu Sri Erlinda, S.IP, M.Si, Bapak Jumili Arianto, S.Pd MH, Bapak Haryono, M.Pd, Bapak Supentri, M.Pd, Bapak Indra Primahardani, SH, MH, Bapak Separen, S.Pd MH, Bapak Mirza Hardian, M.Pd, dan Ibu Haryanti, M.Pd.
8. Teristimewa untuk Ayahanda Waris Damanik dan Ibunda Ernawati Silalahi serta adik saya Intan Sri Maya Damanik dan Rafi Rasyid Al-Fath Damanik yang selalu

menjadi penyemangat kepada penulis untuk lebih tegar dan ikhlas dalam menghadapi kehidupan ini.

9. Teristimewa sepupu terkece yang selalu mendukung dan menjadi penyemangat selama menjalani studi, Sandi Prima Naibaho.
10. Teman-teman geng biawak yang telah setia menemani dan mendukung selama menjalani studi hingga selesai, Meryo Tiani, Mustika Permata Indah, Claudya Octavianti dan Ditra Verbina Gurusinga.
11. Teman-teman seangkatan, pejuang amanah 2016 yang senantiasa berjuang selama proses pendidikan berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

Anas Sudijono. 2015. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo.

Ghazaly A.L Nora. 2014. *Ilmu Komunikasi Politik*. Jakarta: Mercuri Buana.

Rio, SW.2019.Partisipasi Mahasiswa Dalam Pemilu.*Kompasiana*, 29 Maret 2019.

Sugiono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta